

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri atas berbagai Provinsi, Kabupaten dan Kota. Setiap daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintah Daerah yang sudah diatur dalam Undang-Undang (Republik Indonesia, 2014a). Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, Pemerintah Pusat akan lebih sulit untuk mengatur sendiri setiap daerah yang ada di Indonesia. Desa secara umum dapat didefinisikan sebagai pembagian antar wilayah administratif kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa juga dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia (Republik Indonesia 2014b).

Salah satu upaya yang digunakan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014). Kemandirian adalah salah satu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri, memajukan perekonomian masyarakat desa dan dapat mengatasi ketidak selarasan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014).

Salah satu upaya untuk mencapai kemandirian tersebut desa dapat menjangkau kelompok sasaran yang akan disejahterakan, yaitu

dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut dengan BUMDes (pemandagri No. 39 Tahun 2010). Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Pasal 1 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa” Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan desa, BUMDes akan melakukan usaha skala mikro yang setiap bulannya harus membuat laporan keuangan dari masing-masing unit usahanya secara akuntabel dan transparan. Selain itu, dua kali dalam setahun pihak BUMDes juga diwajibkan untuk melaporkan perkembangan usaha yang dikelolanya kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa.

Dalam mengelola usaha desa, BUMDes biasanya memanfaatkan potensi ekonomi dan sumber daya alam (SDA) di desa. Setiap desa mempunyai potensinya masing-masing, sehingga tidak semua desa memiliki SDA. Sebagian besar pendapatan dari pengelolaan usaha BUMDes diperuntukan untuk membangun desa, mengembangkan usaha, dan memberdayakan masyarakat. Dengan adanya BUMDes di setiap desa akan membantu pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa yang bersifat inovatif dan kreatif, sehingga memperbesar kesempatan warga desa untuk mendapatkan pekerjaan di desa melalui usaha desa yang dikembangkan oleh BUMDes tersebut.

Namun, pada praktiknya masih banyak BUMDes yang belum menyusun laporan keuangan secara lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP. Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Buleleng, khususnya pada BUMDes Gunung Sari Mas Desa Bulian. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten

Buleleng tahun 2021, terdapat 129 BUMDes, dan BUMDes Gunung Sari Mas termasuk dalam kategori "berkembang". Sejak didirikan tahun 2013 melalui program GERBANGSADU Mandara, BUMDes ini telah mengelola berbagai unit usaha, seperti simpan pinjam, pertokoan, air minum (PAM), rent car, TPST, desa wisata, percetakan, dan material bangunan.

Meski usahanya berkembang pesat, penyusunan laporan keuangan BUMDes Gunung Sari Mas belum sepenuhnya mengimplementasikan SAK ETAP secara menyeluruh. Berdasarkan hasil observasi awal, laporan keuangan yang disusun masih terbatas pada neraca dan laporan laba rugi, tanpa menyertakan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAK ETAP belum optimal, baik dari sisi kelengkapan laporan maupun pemahaman teknis dari pengurus BUMDes.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar yang seharusnya diterapkan dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dengan latar belakang akuntansi, tidak adanya sistem pencatatan keuangan yang baku, serta minimnya pendampingan teknis dari lembaga terkait. Padahal, laporan keuangan yang sesuai standar merupakan alat penting untuk menilai kinerja, transparansi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Implementasi SAK ETAP terhadap Laporan Keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gunung Sari Mas Desa Bulian*" guna menganalisis sejauh mana standar akuntansi tersebut telah diterapkan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penyusunannya.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut :

1. BUMDes Gunung Sari Mas masih menggunakan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun standar ini sudah digantikan oleh SAK EP dan kemampuan pengelola dalam memahami dan menerapkan SAK ETAP masih terbatas.
2. Penelitian ini juga mencoba mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan transparansi dari adanya implementasi SAK ETAP yang dapat mempengaruhi peningkatan dalam penyajian informasi keuangannya yang relevan dan dapat dipercaya.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada implementasi SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan di BUMDes Gunung Sari Mas, Desa Bulian. Pembatasan dilakukan untuk memastikan penelitian tetap terarah dan tidak meluas ke aspek yang tidak relevan. Variabel utama yang dikaji dalam penelitian ini mencakup implementasi SAK ETAP, kesiapan sumber daya manusia (SDM), kepatuhan terhadap regulasi, serta faktor penghambat dalam penerapan standar akuntansi ini. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kesiapan BUMDes dalam beralih ke SAK EP, mengingat bahwa SAK ETAP sudah digantikan sepenuhnya mulai 1 Januari 2025. Namun, penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek teknis transisi ke SAK EP maupun perbandingan detail antara kedua standar akuntansi tersebut. Data yang digunakan terbatas pada laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan SAK ETAP dan wawancara dengan pengelola BUMDes terkait implementasi standar tersebut.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan BUMDes Gunung Sari Mas Desa Bulian Berdasarkan SAK ETAP ?
2. Apakah pada laporan keuangan BUMDes telah sesuai ketentuan dengan SAK ETAP ?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan SAK ETAP dalam laporan keuangan BUMDes Gunung Sari Mas Desa Bulian.
2. Untuk mengetahui apakah pada laporan keuangan BUMDes telah sesuai ketentuan dengan SAK ETAP.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut.

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada entitas desa seperti BUMDes. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian terkait dengan penerapan standar akuntansi pada lembaga keuangan skala mikro di tingkat desa.

##### 2. Manfaat Praktis

- Bagi BUMDes Gunung Sari Mas Desa Bulian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi untuk menyusun laporan keuangan yang

lebih lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP. Diharapkan bahwa BUMDes dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka dengan memahami komponen laporan keuangan yang harus disusun. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka.

- Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian serupa, terutama yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi di lembaga keuangan desa. Peneliti kemudian dapat memperluas topik penelitian dengan membandingkan berbagai BUMDes, menganalisis seberapa efektif penerapan standar tersebut, dan menganalisis bagaimana kinerja usaha BUMDes berkorelasi dengan kualitas laporan keuangan.

